



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies



Makalah Kebijakan No. 26

Dampak Tingginya Harga Pangan terhadap Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia

Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur

oleh Assyifa Szami Ilman

www.cips-indonesia.org

Makalah Kebijakan No. 26
Dampak Tingginya Harga Pangan terhadap Bantuan Pangan
Non-Tunai (BPNT) di Indonesia
Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur

Penulis:

Assyifa Szami Ilman

Ucapan Terima Kasih:

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Happy Hearts Indonesia* (HHI) atas dukungannya, serta bantuannya untuk penelitian kami di Pulau Sumba, terutama kepada Ibu Kiki Mariana, *HHI Officer* di Sumba. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Galuh Saesthu yang telah membantu penelitian ini di Kupang, dan Kidung Asmara Sigit serta Nadia Fairuza Azzahra atas bantuannya dalam penelitian ini.

Jakarta, Indonesia

Februari, 2020

Makalah ini berhasil dibuat dari dana yang diberikan oleh *John Templeton Foundation*, yang menghargai independensi analisis kami. Untuk menjaga integritas akademik dan kelembagaan non-partisan kami secara ketat, CIPS secara eksklusif bekerja sama dengan donor yang tidak menentukan temuan, kesimpulan, atau rekomendasi yang disajikan dalam publikasi CIPS.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah tangga prasejahtera Indonesia menggunakan hampir seluruh pendapatannya untuk makanan (67,72%) (BPS, 2016). Konsumsi pangan mereka rata-rata didominasi beras (62,14%), dan kekurangan akan protein, kacang-kacangan, buah-buahan, serta sayuran, yang sebenarnya dibutuhkan untuk kebutuhan nutrisi (BKP Kementan RI, 2018).

Harga pangan yang tinggi di Indonesia berkontribusi terhadap ketidakmampuan untuk membeli pangan yang lebih bernutrisi. Harga tinggi tersebut juga mengurangi efektivitas program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang bertujuan meningkatkan konsumsi makanan bernutrisi melalui bantuan dana untuk membeli beras dan telur. Sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan dimasukkan ke dalam program ini pada tahun 2020. Pada 2019, kios BPNT (e-warung) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, membeli beras dan telur dari pedagang grosir di Makassar dan Surabaya, sehingga harganya sangat bergantung pada harga pasaran di kedua kota tersebut.

Simulasi eksperimental yang dilakukan dengan beberapa ibu di Pulau Sumba menemukan bahwa:

- Peningkatan harga menyebabkan rendahnya pembelian pangan dan penurunan konsumsi rumah tangga bulanan hingga 1,78 kg beras dan 3,73 butir telur;
- Program BPNT meningkatkan konsumsi beras dan telur rumah tangga rata-rata sebesar 21,4 kg beras dan 33,79 butir telur.
- Ketika program BPNT berhadapan dengan skenario kenaikan harga, konsumsi telur menurun hingga 1,2 butir telur per orang, sementara konsumsi beras meningkat sebesar 1,46 kg jika dibandingkan dengan konsumsi sebelum perubahan harga. Kenaikan harga membuat rumah tangga mengorbankan konsumsi protein mereka.

Dampak positif program BPNT berkurang dengan tingginya harga beras dan telur di Indonesia. Pemerintah seharusnya mendukung program BPNT dengan reformasi kebijakan yang mengurangi harga pangan di Indonesia. Intervensi harga tidak membuat harga tetap pada tingkatan yang ditentukan untuk komoditas pangan ini. Alih-alih, monopoli beras berkualitas medium oleh Bulog (Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015) dan kebijakan yang mengatur kuota impor beras melalui rapat koordinasi antar kementerian (Peraturan Kemendag Nomor 1 Tahun 2018) harus dievaluasi kembali. Impor jagung juga diharapkan meningkat, karena jagung adalah bahan pangan penting untuk pakan ternak ayam, sehingga dapat berpengaruh terhadap harga telur.

HARGA PANGAN BERDAMPAK PADA WARGA PRASEJAHTERA

Konsumsi pangan Indonesia didominasi oleh beras (62,14%) dan minim protein, kacang-kacangan, buah, dan sayuran pada tahun 2017 (Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI, 2017). Terlepas dari pola konsumsi semacam itu, masyarakat Indonesia menggunakan rata-rata 51% pengeluaran bulannya untuk makanan. Populasi di pedesaan bahkan mengeluarkan uang dengan proporsi yang lebih tinggi (58,66%), sementara di daerah perkotaan mengeluarkan lebih sedikit (46,70%) (BPS, 2017). Di dalam persentase tersebut terdapat masyarakat yang ada pada dan di bawah garis kemiskinan, yang mengeluarkan kurang dari Rp500.000,- per bulan atau setara dengan 62.72% dari pengeluaran bulanan pada tahun 2016.

Dalam *Global Security Index 2018*, Indonesia berada pada posisi 68 dari 113 negara dalam hal konsumsi makanan sebagai bagian dari pengeluaran rumah tangga. Indeks tersebut juga memperlihatkan pencapaian buruk Indonesia dalam hal keragaman jenis pangan, dan menyebabkan Indonesia berada pada peringkat 102 dari 113 negara. Peringkat-peringkat ini menunjukkan sejauh mana masyarakat Indonesia, terutama yang hidup dalam kemiskinan, menggunakan pendapatan mereka dalam proporsi yang besar seringkali untuk konsumsi pangan yang tidak mencukupi. Kondisi tersebut akhirnya membuat mereka kekurangan untuk keperluan pendidikan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya.

Malnutrisi didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana ada konsumsi yang tidak seimbang antara energi dan nutrisi (WHO, 2018) dan dipengaruhi oleh konsumsi pangan. Hal ini penting karena banyak masyarakat Indonesia yang menderita stunting dan berat badan kurang (30,8% dan 17,7%), sementara itu kelebihan berat badan kaum dewasa meningkat dari 14,8% (2013) menjadi 21,8% dari total populasi pada tahun 2018 (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Pemerintah telah menjalankan beberapa kebijakan sebagai respons dari kondisi tersebut. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pangan melalui subsidi beberapa opsi pangan tertentu. Program ini diharapkan lebih tepat sasaran dalam menjangkau populasi prasejahtera dibandingkan program-program pangan sebelumnya. Program ini menyediakan transfer bulanan sebesar Rp110.000,- melalui kartu debit untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sasarannya adalah 25% keluarga prasejahtera di Indonesia dan dana tersebut dapat digunakan untuk membeli beras dan telur di kios-kios distribusi resmi yang disebut e-warung. Pangan yang tersedia di e-warung dibeli dari berbagai pemasok dengan tingkat kualitas beragam dan dijual dengan harga pasar.

“Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pangan melalui subsidi beberapa opsi pangan tertentu.”

RANCANGAN KEBIJAKAN BPNT

Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan badan pemerintah lainnya telah menginisiasi BPNT seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018. Program ini diharapkan dapat mencapai beberapa objektif berikut ini:

- (i) Mengurangi pengeluaran pangan penerima manfaat dengan memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan mereka,
- (ii) Meningkatkan konsumsi nutrisi,
- (iii) Meningkatkan akurasi dalam menargetkan penerima manfaat,
- (iv) Memberikan opsi bagi para penerima manfaat untuk mengatur kebutuhan pangan mereka, dan
- (v) Membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Dana ditransfer melalui rekening bank yang dipilih dan didaftarkan oleh perwakilan KPM. Untuk masuk dalam kategori KPM, sebuah keluarga harus termasuk dalam kategori paling miskin (persentase sebesar 25%) di daerahnya. Setiap bulan, uang sejumlah Rp110.000,- ditransfer ke rekening bank terdaftar tersebut untuk membeli beras dan telur di e-warung yang sudah ditunjuk. E-warung dioperasikan oleh gerai-gerai yang sudah ditunjuk pemerintah dan sudah memiliki jaringan pemasok yang tidak hanya mensuplai untuk program ini, namun juga menjual beras dan telur untuk masyarakat umum.

BPNT terintegrasi dengan program pemerintah bernama PKH¹ dan KUBE². Agar dapat menjadi penerima manfaat, sebuah keluarga harus didaftarkan sebagai penerima PKH terlebih dahulu. Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan e-warung juga harus merupakan penerima PKH. Unit bisnis KUBE bisa mendapatkan status e-warung, tetapi e-warung bisa juga dikelola oleh *minimarket* dan pihak swasta lainnya.

E-warung bisa fleksibel dalam hal komposisi paket telur dan beras yang mereka jual, dan mereka dapat menggunakan dana yang ada untuk beberapa kali transaksi untuk membeli beras dan telur di lain hari. Akan tetapi, tidak ada larangan bagi e-warung yang ingin menjual paket tidak fleksibel. Paket tidak fleksibel membatasi kemampuan para keluarga untuk membeli pangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka bisa mencari e-warung lainnya yang memiliki penawaran proporsi telur dan beras yang sesuai dengan yang mereka inginkan. E-warung juga diizinkan untuk menyesuaikan harga jual dan kualitas komoditas mereka sebagai respons dari perubahan harga komoditas dan untuk menutup biaya logistik. Akan tetapi, kerangka kerja kebijakan BPNT mengharuskan e-warung untuk menggunakan harga pasar dan apabila harga yang ditetapkan terlalu tinggi, maka hal tersebut berpotensi membuat mereka kehilangan pelanggan.

E-warung juga memiliki kebebasan untuk merencanakan dan menyesuaikan stok bulanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Selain menjual beras dan telur kepada penerima

¹ Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program transfer dana tunai bersyarat untuk pembiayaan rumah tangga seperti pendidikan dan kesehatan.

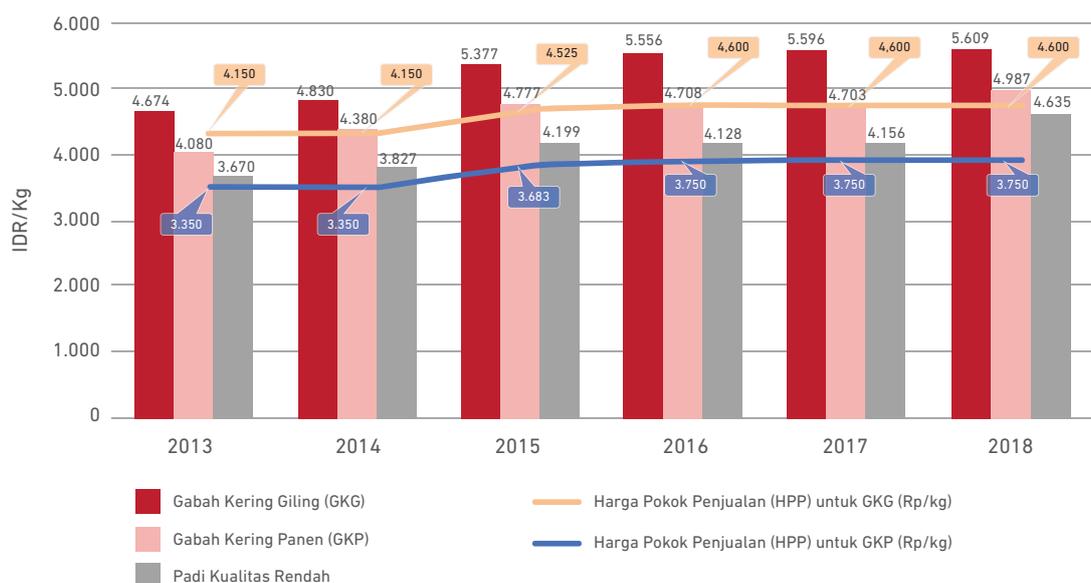
² Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berfokus pada peningkatan pendapatan warga prasejahtera dengan memberikan mereka modal awal untuk membangun unit ekonomi produktif yang dirancang untuk menjadi sumber pendapatan mereka di masa depan. Program ini biasanya melibatkan sebuah kelompok yang terdiri dari 10 orang, yang mengelola unit bisnis, dan diawasi oleh pihak pemerintah.

BPNT, e-warung juga diizinkan untuk menjual komoditas lain, kecuali rokok dan pulsa telepon. Bahkan, Kementerian Sosial mendorong e-warung untuk menyertakan produk-produk lainnya, sesuai dengan visi KUBE yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berwiraswasta dan margin keuntungan. Menawarkan lebih banyak produk juga memperbolehkan e-warung untuk beroperasi secara berkelanjutan dan tidak hanya saat pencairan dana KPM saja. Tidak ada batas resmi tentang berapa besar keuntungan yang boleh dibuat e-warung (wawancara dengan ET - Pegawai pemerintah Kementerian Sosial, 2019).

E-warung diharapkan menjual beras dan telur sesuai harga pasar. Hal tersebut penting untuk menggarisbawahi bagaimana regulasi berdampak terhadap harga-harga komoditas ini. Harga beras diatur dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017, yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk beras, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, yang mengatur pembelian beras. Regulasi sebelumnya menetapkan semua penjual, termasuk e-warung, untuk mengikuti HET beras, yang diatur antara Rp9.450,- hingga Rp10.250,- per kg untuk beras berkualitas medium dan Rp12.800,- hingga Rp13.600,- per kg untuk beras premium, tergantung dari daerahnya.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 memaksa BULOG (Badan Urusan Logistik, Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab terhadap distribusi beras) untuk membeli Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) dengan harga Rp3.700,- per kg dan Rp4.600,- per kg, dengan fleksibilitas 10%. Harga tersebut bukanlah harga pasar yang kompetitif, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Regulasi tersebut berdampak pada e-warung yang membeli beras mereka dari BULOG. Beberapa keluarga penerima manfaat mengeluh kepada e-warung bahwa kualitas beras dari BULOG tidak sebaik dari pemasok lain. Mereka yang tidak puas dengan kualitas beras dari satu kios tertentu kemungkinan besar akan pergi ke kios lainnya, maka e-warung yang membeli beras dari BULOG bisa kehilangan pelanggannya apabila kualitas berasnya tidak ditingkatkan.

Gambar 1.
Tingkat Harga Padi dan Beras, 2013-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Pada awal Juli 2019, Kementerian Sosial menunjuk BULOG untuk menjadi pemasok utama beras dalam program BPNT, karena BULOG mengalami persediaan beras berlebih di gudang penyimpanannya. Sebelum pengumuman tersebut, BULOG menyediakan hanya 47% beras yang didistribusikan melalui program BPNT, dan sisanya sebesar 53% disediakan oleh distributor swasta. Di bawah skema baru ini, Kementerian Sosial memberikan BULOG kapasitas untuk mendistribusi hingga 70% beras dari program tersebut (Jakarta Post, 2019).

Mengikuti Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2018, BULOG diizinkan untuk membeli beras dari petani dengan harga pasar, dan apabila ada kerugian yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara harga jual dan pembelian, maka akan ditutup oleh pemerintah. Kondisi tersebut sebetulnya memberikan BULOG kesempatan untuk menyediakan beras dengan kualitas yang lebih baik. Tetap saja, BULOG harus berkompetisi dengan kebanyakan distributor swasta dalam program BPNT untuk memasok beras berkualitas baik.

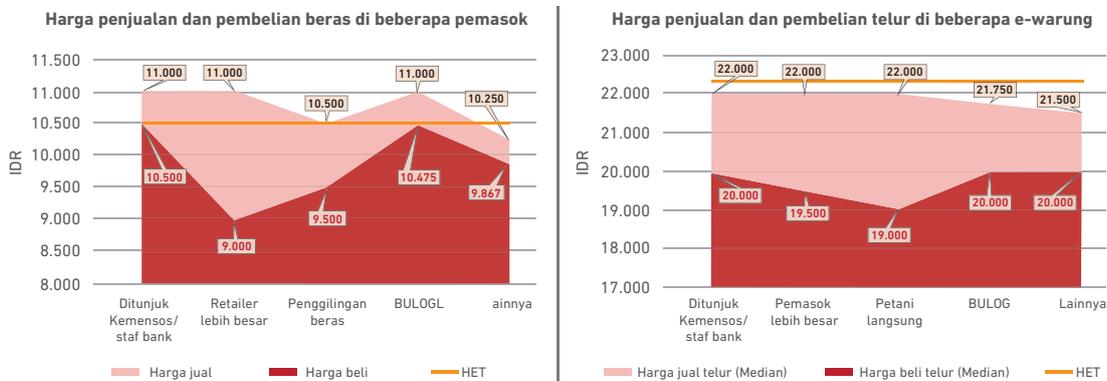
Sementara itu, harga telur diatur di bawah Permendag Nomor 96 Tahun 2018, yang memberikan mandat tentang tingkat harga BULOG dan BUMN lainnya. Distributor/agen lainnya yang menjual telur harus mengacu ke harga yang sudah diatur tersebut. Harga *farmgate* ditetapkan dengan rentang harga Rp18.000,- hingga Rp20.000,- per kg dan harga konsumen pada Rp23.000,- per kg. Harga tersebut kemudian diubah pada awal 2019 melalui Surat Edaran Kemendag Nomor 82 Tahun 2019, yang menaikkan harga *farmgate* menjadi Rp20.000,- hingga Rp22.000,- per kg dan harga konsumen menjadi Rp25.000,- per kg. Perubahan tersebut sifatnya sementara dan berlaku hanya dari Januari-Maret 2019. Pada awal Juli 2019, Kementerian Perdagangan mengindikasikan bahwa harga akan disesuaikan lagi, dan bahwa Permendag Nomor 96 Tahun 2018 akan dievaluasi. Petani mendorong pemerintah untuk menaikkan harga *farmgate* menjadi Rp19.950,- hingga Rp22.050,- per kg. Merespons hal tersebut, Kementerian Perdagangan mengumumkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi.

ANALISIS BPNT

Tak kalah pentingnya dengan rancangan program BNPT ialah cara pelaksanaan atau implementasinya. Studi ini mengamati 8 dari 20 e-warung di Kupang, Nusa Tenggara Timur^{3,4} untuk mengerti tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program ini dan untuk membandingkan temuan baru terhadap studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya. E-warung yang diamati adalah e-warung KUBE Edelweis, e-warung KUBE Teratai, e-warung KUBE Bonsai, e-warung KUBE Sehati, e-warung KUBE Kelapa, e-warung KUBE Abadi, e-warung KUBE Beringin, dan e-warung KUBE Tulidei. E-warung tersebut di atas dipilih secara acak.

Rata-rata, e-warung yang diwawancarai melayani sekitar 300 KPM. Kebanyakan e-warung mendapatkan beras dan telur dari pemasok swasta dengan harga kisaran Rp385.000- sampai Rp420.000,- per 50 kg beras dan Rp50.000 sampai Rp60.000,- untuk satu rak berisi 60 butir telur. Seluruh suplai beras dan telur datang dari Pasar Inpres Naikoten I, pasar terbesar di kota tersebut. Hanya satu e-warung yang membeli stoknya dari pemasok swasta dan BULOG. Hal tersebut sesuai dengan studi yang dilakukan oleh *MicroSave Consulting* (MSC, 2019), yang menyatakan bahwa e-warung menghasilkan margin keuntungan lebih tinggi ketika membeli beras dari pemasok lain selain BULOG (Gambar 2).

Gambar 2.
Margin Keuntungan E-Warung, 2018



Sumber: *MicroSave Consulting*, 2019

Setiap unit KUBE terdiri dari 7-10 anggota yang kebanyakan adalah perempuan serta kaum ibu yang terdaftar di PKH. Semua warung yang diamati didirikan dengan bantuan modal yang diinvestasikan oleh Kementerian Sosial dan berjumlah sekitar Rp 3-5 juta. Anggota KUBE harus menyediakan lahan (yang harus dimiliki oleh salah satu anggotanya), dan mereka harus membeli barang untuk toko mereka. Ada dua bank yang mendukung program BPNT di Kupang, yaitu

³ Informasi lebih lanjut tersedia di bagian lampiran.

⁴ Studi ini dilakukan di ibu kota provinsi, yaitu Kupang, dan merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi NTT yang sudah mengimplementasikan program BPNT secara menyeluruh, meskipun wilayah lainnya di NTT juga sudah berpartisipasi dalam program versi sebelumnya (BPNT-Rastra).

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank NTT. Bank-bank tersebut menyediakan mesin *Electronic Data Capture* (EDC), yaitu sebuah terminal pembayaran yang digunakan oleh gerai untuk menerima pembayaran dengan kartu, serta panduan bagaimana anggota KUBE dapat menggunakan mesin tersebut.⁵

Pengelola e-warung dan keluarga penerima manfaat mengonfirmasi dalam beberapa wawancara bahwa BPNT secara umum jauh lebih baik dibandingkan program Rastra sebelumnya. Rastra mendistribusikan lebih banyak beras (10 kg) secara konsisten setiap bulan melalui kantor desa, sementara BPNT menyediakan tidak hanya beras namun juga telur. Implementasi Rastra di Kupang menghadapi keterlambatan pengantaran dan beberapa penerima menyimpan dana bantuan mereka hingga tiga bulan. Terlebih lagi, beberapa desa memutuskan untuk mendistribusikan beras kepada Ketua RT⁶ sehingga penerima tidak harus berkendara jauh untuk mengambil bantuan beras mereka. Akan tetapi, praktik tersebut bermasalah. Dalam beberapa kasus, Ketua RT memutuskan untuk mendistribusikan beras ke seluruh warga untuk menghindari adanya kecemburuan antar warga, alih-alih memberikannya hanya kepada keluarga yang paling membutuhkan. Kondisi tersebut mengurangi volume beras untuk penerima yang sudah ditargetkan.

Masalah Rastra sudah dikurangi dengan mendistribusikan dana langsung ke KPM dan dengan mengizinkan mereka untuk menggunakan e-warung mana saja di bawah BPNT. Akan tetapi, pada fase awal BPNT, beberapa KPM mengeluh bahwa mereka menerima kuantitas beras lebih sedikit, karena di bawah program yang baru mereka hanya boleh menerima hingga 9 kg, meskipun anggota e-warung KUBE berhasil menawarkan beras dan telur dengan kualitas lebih baik dibandingkan program yang lama.

Dari delapan e-warung yang diamati, enam di antaranya menggunakan kebijakan paket yang tidak fleksibel. Tiga di antaranya menawarkan penukaran dana bulanan sebesar Rp110.000,- untuk 8 kg beras dan 7 butir telur. Seiring berjalannya waktu, mereka menyesuaikan pakatnya dengan kebutuhan pembelian dan penyimpanan stok mereka. Tiga e-warung lainnya menawarkan 9 kg beras dan 5 butir telur. E-warung tersebut mengatur harga beras pada harga Rp11.000-Rp11.500,- per kg dan menjual telur seharga Rp2.000,- per butir⁷. Dua e-warung menawarkan paket yang fleksibel yang memperbolehkan KPM untuk menentukan kuantitas beras dan telur yang mereka inginkan dengan dana mereka. Paket yang tidak fleksibel bisa mengurangi fleksibilitas pembelian penerima manfaat, tetapi bisnis model ini menyediakan opsi lebih baik untuk paket dan mengurangi antrian (TNP2K, 2018; MSC, 2019).

Beberapa e-warung menjual produk lainnya, seperti peralatan rumah tangga, makanan ringan, biskuit, dan sembilan bahan pokok (sembako) yang dianggap penting di Indonesia. Penjualan barang-barang lain memberikan keuntungan, namun wawancara dengan anggota e-warung mengungkap fakta bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan dengan menjual barang-barang BPNT. Studi nasional menemukan bahwa e-warung yang dikelola oleh KUBE hanya menghasilkan pendapatan rata-rata sekitar Rp1.300.000,- (MSC, 2019). Saat dibagi kepada

⁵ Studi ini tidak berhasil menemukan bendahara e-warung KUBE yang dapat memberikan informasi data kinerja keuangan mereka. Para narasumber yang diwawancara tidak memberikan nomor telepon bendahara, ketua, atau pegawai pemerintah yang bertindak selaku pengawas mereka. Kondisi tersebut membuat penulis tidak mungkin untuk menghitung keuntungan dan kerugian untuk setiap e-warung.

⁶ *Rukun Tetangga*, sebuah lingkungan yang terdiri dari 20-40 rumah.

⁷ Angka yang diamati ini sudah disesuaikan dengan tingkat harga daerah yang digunakan.

sepuluh anggota, penghasilan yang ada terlalu kecil bagi seorang anggota untuk sepenuhnya bekerja di KUBE. Responden studi ini menyatakan bahwa pengelola e-warung sebetulnya bekerja sukarela alih-alih bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

Karena tidak menyediakan sumber pendapatan yang signifikan bagi semua anggotanya, kebanyakan e-warung di Kupang buka hanya dari tanggal 15 sampai akhir bulan. Tanggal buka e-warung tidak diatur, tetapi keluarga penerima biasanya mengambil dana mereka untuk digunakan membeli stok beras dan telur di akhir bulan. Semua e-warung yang diamati menutup toko mereka pada hari-hari lainnya dan hanya beroperasi selama 15 hari kerja ditambah satu atau dua hari tambahan untuk membeli beras dan telur dari pemasok.

Meskipun e-warung menggunakan pemasok yang berbeda-beda, kebanyakan mereka berada di Pasar Inpres Naikoten I dan mereka hanya membeli dari empat penjual grosir beras dan telur di Makassar dan Surabaya. Para pemain tersebut biasanya menawarkan harga yang sama, maka perubahan harga beras dan telur di Kupang ditentukan oleh perubahan harga di Makassar dan Surabaya, serta perbedaan jarak pengantaran ke konsumen. Tabel 1 memberikan perbandingan sederhana dari tujuan regulasi BPNT dan realitasnya di Kupang. Penjelasan lebih lanjut mengenai BPNT dapat ditemukan di lampiran.

Tabel 1.
Tabel Perbandingan antara Regulasi dan Temuan

INDIKATOR	REGULASI	TEMUAN DI KUPANG
TUJUAN E-WARUNG KUBE	Untuk mengasah keterampilan berwirausaha anggota KUBE dan menghasilkan keuntungan.	Dianggap sebagai kegiatan sukarela, tidak semua anggota KUBE yang terdaftar secara aktif terlibat dalam pengelolaan e-warung.
KOMODITAS YANG DIJUAL	Didorong untuk menjual komoditas di luar telur dan beras (kecuali rokok dan pulsa).	Beberapa e-warung menjual produk lain selain beras dan telur.
JAM OPERASIONAL	E-warung buka secara teratur, tidak hanya saat pencairan BPNT.	Semua e-warung yang diamati hanya buka dari tanggal 15 sampai akhir bulan.
PAKET	BPNT mendorong fleksibilitas yang merespons preferensi penerima manfaat untuk beras dan telur.	Dari delapan e-warung yang diamati, enam di antaranya menggunakan kebijakan paket yang tidak fleksibel untuk menghindari masalah teknis.
PENCAIRAN DANA BANTUAN	Penerima manfaat dapat melakukan beberapa transaksi ketika menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).	Kebanyakan penerima menggunakan dana bantuan mereka dalam satu transaksi. Tidak ada larangan atau dorongan dari e-warung mengenai waktu yang ideal untuk pencairan dana.
PEMASOK	Pemerintah memang merekomendasikan pemasok KUBE, tetapi mereka juga bebas untuk memilih pemasok lain.	Kebanyakan KUBE di Kupang memilih pemasok swasta untuk beras dan telur. Hanya satu e-warung yang membeli dan menjual beras dari BULOG.
PENENTUAN HARGA	Harga jual diatur e-warung berdasarkan harga pasar.	Harga jual diatur e-warung berdasarkan harga pasar.
BANK PENDUKUNG BPNT	HIMBARA (Asosiasi Bank-Bank BUMN).	BRI dan Bank NTT.

Sumber: Dokumentasi penulis, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, TNP2K (2017), dan wawancara dengan Pegawai Kemensos (2019)

Agar dapat mencari tahu lebih lanjut mengenai dampak BPNT terhadap pengeluaran untuk pangan pada keluarga-keluarga penerima manfaat, maka dipilih beberapa sampel rumah tangga di Pulau Sumba untuk dihitung pengeluarannya yang digunakan untuk membeli beras dan telur. Sebuah rumah tangga rata-rata memiliki tujuh anggota keluarga⁸. Dari pengamatan di pasar di Sumba, didapatkan harga beras adalah Rp12.000,- per kg dan harga telur Rp2.000,- per kg⁹. Pengeluaran bulanan rata-rata rumah tangga untuk beras adalah Rp635.027,-, atau setara dengan konsumsi sekitar 52,9 kg beras per bulan. Pengeluaran bulanan rata-rata rumah tangga untuk telur adalah Rp90.162,-, atau setara dengan 45 butir telur (sekitar 2,7 kg telur¹⁰). Rata-rata, setiap anggota keluarga mengkonsumsi sekitar 7,6 kg beras dan 6 butir telur per bulan. Jumlah tersebut lebih sedikit bila dibandingkan dengan angka statistik resmi nasional yang menyebutkan konsumsi rata-rata nasional untuk beras adalah 9,55 kg beras dan 11 butir telur per kapita per bulan (Kementerian Pertanian, 2018).

Dana BPNT sebesar Rp110.000,- menutup sekitar 15,16% pengeluaran bulanan rata-rata sebuah rumah tangga. Dengan mengasumsikan bahwa proporsi serupa digunakan untuk beras dan telur, maka BPNT kemungkinan telah meningkatkan konsumsi beras rumah tangga hingga Rp96.323,79,- atau sekitar 8 kg, dan meningkatkan konsumsi telur hingga Rp13.676,21,- atau sekitar 7 butir telur, yang setara dengan tambahan 1,15 kg beras dan 1 butir telur per anggota keluarga per bulan. Akan tetapi, beberapa rumah tangga mungkin memilih untuk tidak membeli tambahan beras dan telur, alih-alih menggunakan anggaran rumah tangganya yang semula untuk beras dan telur malah untuk membeli komoditas lainnya.

⁸ Info lengkap mengenai sampel ini bisa ditemukan di Lampiran.

⁹ Penjual grosir di Sumba menjual telur dan ayam per satuan dan bukan dengan ditimbang beratnya. Meskipun praktik ini ilegal (JPNN.com,2019 ; Proka.co, 2019), namun telah diterima secara luas tidak hanya di Sumba, tetapi juga di Kupang dan di beberapa daerah lainnya di Indonesia.

¹⁰ Dengan asumsi 1 kg telur terdiri dari 16 butir telur, sesuai dengan Standar Ukuran Telur Eropa (Ukuran Medium: 63 gram).

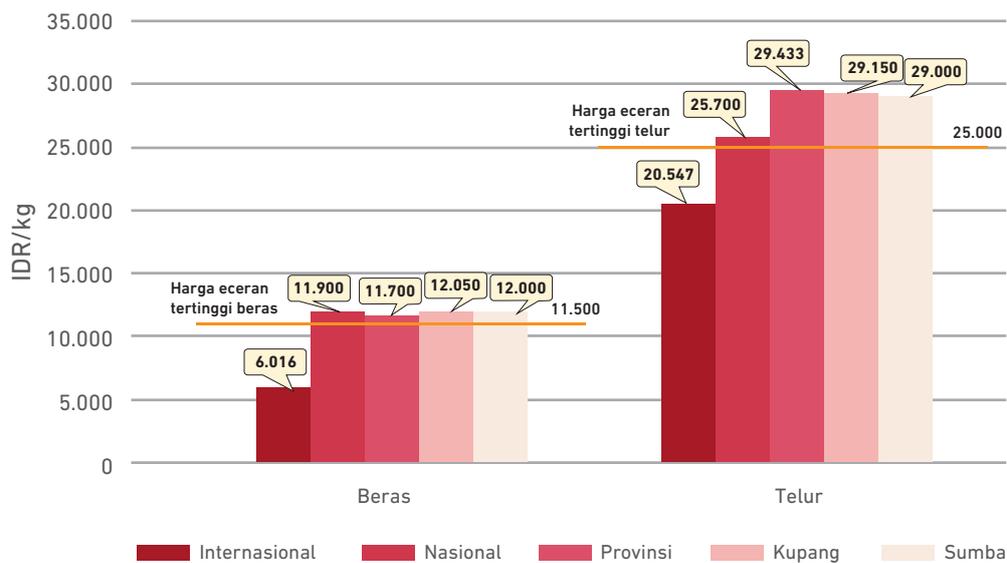
RESPONS RUMAH TANGGA TERHADAP PERUBAHAN HARGA PANGAN

Saat BPNT memberlakukan harga pasar untuk beras dan telur, maka penting untuk mengukur dampak harga pangan terhadap program BPNT. Memahami hubungan ini dapat membantu BPNT mencapai tujuannya yang ingin mensubstitusi sebagian pengeluaran pangan warga prasejahtera. Dengan tujuan tersebut, maka dilakukan studi eksperimental di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Keduanya terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Selain itu, program BPNT belum diperkenalkan di kedua kabupaten ini.

Prevalensi stunting di NTT dianggap yang terburuk di Indonesia, angkanya mencapai 42,6% dari populasi (termasuk gejala lain yang juga menandakan malnutrisi). Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya adalah dua daerah yang memiliki ketahanan pangan paling rendah di NTT (*World Food Program, 2015*) dan kedua daerah tersebut adalah daerah prioritas pengurangan stunting di Indonesia.

Harga beras dan telur di kabupaten tersebut lebih tinggi daripada harga rata-rata nasional dan internasional, dan hanya sedikit di bawah harga di daerah ibu kota, yaitu Kupang. Hal tersebut semakin membuat kedua komoditas tersebut menjadi tidak terjangkau. Gambar 3 membandingkan harga-harga beras dan telur di bulan Januari 2019. Perlu dicatat bahwa harga nasional beras dan telur jauh di atas harga dunia, sementara harga di daerah lebih tinggi daripada HET yang sudah diatur di angka Rp9.450,- sampai Rp10.250,- per kg untuk beras berkualitas medium dan Rp25.000,- per kg untuk telur.

Gambar 3.
Perbandingan Harga Beras dan Telur



Sumber: *World Bank Commodity Price (Pink Sheet)* Januari 2019 dan Bank Indonesia (PIHPS)

Agar dapat menelaah dampak harga pangan terhadap pola konsumsi, 38 ibu-ibu dari lima desa di kabupaten sasaran berpartisipasi dalam sebuah studi eksperimental.¹¹ Kuesioner dibuat berdasarkan harga pasar untuk 12 komoditas: beras, daging ayam, daging sapi, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai, gula, mie, rokok, minyak goreng, dan telur.^{12,13}

“
Secara keseluruhan, para subjek merespons kenaikan harga pangan dengan mengurangi konsumsi.”

Secara keseluruhan, para subjek merespons kenaikan harga pangan dengan mengurangi konsumsi. Simulasi kenaikan harga beras dan telur menurunkan konsumsi rata-rata hingga 1,78 kg beras dan 3,73 butir telur. Akan tetapi, perubahan harga yang serupa untuk pangan kaya protein menurunkan konsumsi telur rata-rata sebanyak 2,99 butir telur dan meningkatkan konsumsi beras rata-rata sebanyak 1,17 kg. Perkenalan kepada program BPNT meningkatkan konsumsi beras dan telur sebanyak 21,4 kg beras dan 33,79 butir telur pada seluruh sampel, di setiap bulannya. Akan tetapi, angka tersebut berubah ketika harga beras juga dinaikkan. Hasilnya, konsumsi telur turun sejumlah 1,2 butir, sementara itu konsumsi beras naik 0,2 kg. Singkatnya, program BPNT menaikkan konsumsi beras dan telur, tetapi kenaikan harga pangan menyebabkan rumah tangga memprioritaskan beras daripada telur, sehingga mengurangi konsumsi nutrisi yang penting.

“
Program BPNT menaikkan konsumsi beras dan telur, tetapi kenaikan harga pangan menyebabkan rumah tangga memprioritaskan beras daripada telur, sehingga mengurangi konsumsi nutrisi yang penting.”

¹¹ Ada 56 ibu-ibu yang ingin berpartisipasi, namun hanya 38 yang akhirnya dapat mengikuti studi karena adanya hambatan buta huruf dan tidak mampu memahami instruksi survei. Penjelasan metodologi telah ditambahkan di bagian Lampiran.

¹² Rokok dianggap sebagai komoditas pangan menurut BPS. Komposisi paket pangan dipilih berdasarkan pentingnya komoditas tersebut di tengah masyarakat dan dilihat dari besarnya pengeluaran untuk setiap komoditas tersebut.

¹³ Studi ini tidak mengikutsertakan daging sapi dari pengamatan karena kami hanya menemukan satu responden yang secara konsisten membeli daging sapi. Kondisi tersebut dapat merusak hasil dari sekelompok sampel ini. Berdasarkan beberapa wawancara, kami menyimpulkan bahwa kondisi tersebut merupakan praktik kebudayaan—masyarakat di Sumba biasanya mendapatkan daging sapi setiap bulan melalui acara adat di komunitas mereka. Akan tetapi, karena pertanyaan mengenai daging sapi tetap ada di dalam survei, maka mungkin saja perubahan probabilitas perubahan harga daging sapi dapat memengaruhi pengeluaran yang dilaporkan.

A. Dampak Perubahan Harga Pangan terhadap Pengeluaran Konsumen

Tabel 2 membandingkan perbedaan nilai rata-rata antara pengeluaran pra dan pasca intervensi setelah harga beras dan telur dinaikkan sebesar Rp500,-.¹⁴

Tabel 2.
Perubahan Pengeluaran dengan Kenaikan Harga Beras dan Telur

Pengeluaran Konsumen	Beras (kg)	Daging Ayam (unit)	Jagung (kg)	Bawang Merah (kg)	Bawang Putih (kg)	Cabai (mangkuk)	Gula (kg)	Mie Instan (bungkus)	Rokok (bungkus)	Minyak Goreng (l)	Telur (Unit)
Sebelumnya	11,89	1,14	3,00	0,91	0,80	1,20	1,61	4,54	1,83	0,99	12,43
Konsumen (n)	33	7	8	30	26	27	33	12	6	28	23
Setelahnya	10,10	1,00	2,86	0,87	0,87	1,19	1,60	6,46	1,83	1,02	8,71
Konsumen (n)	33	2	7	30	24	24	30	13	6	28	24
Perbedaan Konsumsi	-1,78	-0,14	-0,14	-0,04	0,07	-0,02	-0,01	1,92	0,00	0,03	-3,73
Konsumen (n)	0	-5	-1	0	-2	-3	-3	1	0	0	1

Sumber: Kalkulasi penulis

Menaikkan harga beras dan telur berdampak pada penurunan tingkat konsumsi rata-rata kedua komoditas, selain itu juga berdampak pada konsumsi komoditas lainnya. Konsumsi bawang putih dan mie instan meningkat bersamaan dengan kenaikan harga beras dan telur. Konsumsi ayam sangat menurun, diikuti dengan cabai, gula, bawang putih, dan jagung. Kenaikan harga beras dan telur memengaruhi seluruh konsumsi dan paket nutrisi sebuah rumah tangga.

Skenario lainnya terdiri dari kenaikan harga pangan protein — kenaikan sebesar Rp22.000,- untuk ayam, Rp3.000,- per kg daging sapi, dan Rp500 untuk telur.¹⁵ Gambar 3 menunjukkan hasil intervensi ini.

Tabel 3.
Perubahan Pengeluaran dengan Kenaikan Harga Daging Ayam dan Telur

Pengeluaran Konsumen	Beras (kg)	Daging Ayam (unit)	Jagung (kg)	Bawang Merah (kg)	Bawang Putih (kg)	Cabai (mangkuk)	Gula (kg)	Mie Instan (bungkus)	Rokok (bungkus)	Minyak Goreng (l)	Telur (Unit)
Sebelumnya	11,89	1,14	3,00	0,91	0,80	1,20	1,61	4,54	1,83	0,99	12,43
Konsumen (n)	33	7	8	30	26	27	33	12	6	28	23
Setelahnya	13,60	1,00	3,21	0,91	0,97	1,24	1,65	5,53	2,33	1,17	9,44
Konsumen (n)	33	9	14	27	23	21	26	15	3	23	18
Perbedaan Konsumsi	1,71	-0,14	0,21	0,00	0,17	0,03	0,05	0,99	0,50	0,18	-2,99
Perbedaan Konsumen (n)	0	2	6	-3	-3	-6	-7	3	-3	-5	-5

Sumber: Kalkulasi penulis

¹⁴Perubahan ini berdasarkan pengamatan terhadap perubahan harga dunia di tahun berikutnya.

¹⁵Kenaikan eksperimental ini berdasarkan pengamatan kenaikan harga dari tahun sebelumnya.

Kenaikan harga daging ayam, sapi, dan telur memengaruhi tingkat konsumsi komoditas tersebut dan juga jumlah responden yang akan terus membeli komoditas tersebut. Konsumsi daging ayam menurun sebanyak 0,14 unit, tetapi dua responden lainnya memutuskan untuk membeli ayam. Nampaknya kenaikan harga pada pangan berprotein ini meningkatkan jumlah rumah tangga yang mengonsumsi daging ayam dengan mengorbankan komoditas lain—permintaan gula, minyak goreng, cabai, bawang putih, bawang merah, dan rokok menurun dalam rangka merespon kenaikan harga.¹⁶ Lima konsumen tidak lagi membeli telur dan konsumsi rumah tangga rata-rata menurun hingga hampir 3 butir telur. Menariknya, responden melaporkan bahwa mereka akan cenderung membeli lebih banyak mie instan.

Secara keseluruhan, kenaikan harga beras, telur, daging sapi, dan ayam diprediksi akan berdampak pada keseluruhan kelompok komoditas yang dikonsumsi. Ketika harga naik, konsumsi gula, cabai, minyak goreng, dan telur turun paling drastis, diikuti dengan bawang putih dan bawang merah. Tingkat konsumsi rata-rata dan jumlah konsumen komoditas-komoditas ini berkurang. Konsumsi mie instan meningkat karena sering dijadikan substitusi untuk beras, tetapi mengandung protein lebih sedikit dan lemak yang lebih banyak daripada beras (Park et al., 2011).

¹⁶ Berkurangnya konsumsi rokok diasumsikan karena semua responden berasal dari kalangan ibu paruh baya. Sementara itu kaum bapak cenderung untuk memprioritaskan konsumsi rokok. Asumsi ini didukung oleh indikasi para ibu-ibu yang mengatakan bahwa mereka menganggap rokok sangat mahal dan tidak penting untuk kehidupan sehari-hari seperti yang ditunjukkan di bagian berikut ini.

B. Dampak Harga Pangan terhadap BPNT

Pemerintah Indonesia, melalui BPNT, menyediakan bantuan non-tunai untuk rumah tangga prasejahtera setiap bulannya yang bisa ditukar dengan beras dan telur. E-warung bebas untuk menjual dengan harga pasar yang biasanya melebihi HET dan diatur oleh pemerintah Indonesia (Gambar 3). Harga-harga pangan yang tinggi dapat berdampak pada kemampuan BPNT untuk meningkatkan konsumsi pangan keluarga prasejahtera.

Studi eksperimental yang dilakukan untuk penulisan makalah ini mensimulasikan bagaimana responden akan mengubah konsumsi mereka di masa depan setelah menerima dana bantuan BPNT begitu program ini diperkenalkan di daerah-daerah mereka. Studi ini juga memperkirakan bagaimana perubahan harga bisa memengaruhi konsumsi beras, telur, dan komoditas pangan lainnya yang tidak bisa ditutup dengan dana bantuan.

Tabel 4.
Perubahan Pengeluaran dengan Simulasi BPNT

Pengeluaran Konsumen	Beras BPNT (kg)	Telur BPNT (unit)	Beras (kg)	Daging Ayam (unit)	Jagung (kg)	Bawang Merah (kg)	Bawang Putih (kg)	Cabai (mangkuk)	Gula (kg)	Mie Instan (bungkus)	Rokok (bungkus)	Minyak Goreng (l)	Telur (Unit)
Sebelumnya			11,89	1,14	3,00	0,91	0,80	1,20	1,61	4,54	1,83	0,99	12,43
Konsumen (n)			33	7	8	30	26	27	33	12	6	28	23
Setelahnya	6,18	13,57	15,21	1,00	4,14	1,06	0,85	1,33	1,53	4,00	1,67	1,13	20,22
Konsumen (n)	37	37	18	9	14	28	23	21	25	12	3	28	9
Perbedaan Konsumsi	6,18	13,57	3,32	-0,14	1,14	0,15	0,04	0,13	-0,07	-0,54	-0,17	0,14	7,79
Konsumen (n)			-15	2	6	-2	-3	-6	-8	0	-3	0	-14

Sumber: Kalkulasi penulis

Penerima bantuan rata-rata membeli 6 kg beras dan sekitar 13 butir telur per rumah tangga per bulan (Tabel 4) menggunakan dana BPNT dalam simulasi. Mereka mengalokasikan sebagian besar dana yang masih mereka miliki untuk membeli jagung lebih banyak. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh budaya lokal dan tidak bisa dilihat sebagai preferensi nasional, karena konsumsi jagung lebih populer di Sumba dan NTB dibandingkan di daerah lain di Indonesia.

BPNT secara signifikan mengurangi beban pembelian beras dan telur. 15 responden berhenti membeli beras dan 14 lainnya berhenti membeli telur dari pendapatan pribadi mereka. Mereka yang masih membeli kedua komoditas tersebut meningkatkan konsumsi mereka sekitar 3 kg beras dan 5 butir telur dari rata-rata sekitar 21,4 kg beras dan 33,79 butir telur setiap bulan.

Alokasi tersebut berubah seiring dengan perubahan harga pangan. Tabel 5 menunjukkan dampak yang diprediksi dari kenaikan harga beras dan telur sebesar Rp500,- per kg di bawah skenario dana BPNT yang disimulasikan.

Mereka yang masih membeli kedua komoditas tersebut meningkatkan konsumsi mereka sekitar 3 kg beras dan 5 butir telur dari rata-rata sekitar 21,4 kg beras dan 33,79 butir telur setiap bulan.

Tabel 5.
Perubahan Pengeluaran dengan Kenaikan Harga Pangan dan Simulasi BPNT

Pengeluaran Konsumsi	Beras BPNT (kg)	Telur BPNT (unit)	Beras (kg)	Daging Ayam (unit)	Jagung (kg)	Bawang Merah (kg)	Bawang Putih (kg)	Cabai (mangkuk)	Gula (kg)	Mie Instan (bungkus)	Rokok (bungkus)	Minyak Goreng (l)	Telur (unit)
Sebelumnya	6,18	13,56	15,21	1,00	4,14	1,06	0,85	1,33	1,53	4,00	1,67	1,13	20,22
Konsumen	37	37	18	9	14	28	23	21	25	12	3	28	9
Setelahnya	7,64	10,63	14,61	1,09	8,60	10,67	0,98	1,32	1,60	4,67	2,33	1,03	15,78
Konsumen	37	37	15	10	10	27	21	17	29	11	3	22	9
Perbedaan Konsumsi	1,46	-2,93	-0,60	0,08	4,5	9,6	0,13	-0,01	0,06	0,67	0,67	-0,10	-4,44
Perbedaan Konsumen (n)	0	0	-3	1	-4	-1	-2	-4	4	-1	0	-6	0

Sumber: Kalkulasi penulis

“Merespons kenaikan harga, para konsumen sekarang menggunakan dana BPNT untuk membeli rata-rata 1,46 kg beras lebih banyak dan 3 butir telur lebih sedikit daripada sebelum kenaikan harga.”

Simulasi kenaikan harga tersebut mengurangi jumlah beras dan telur yang dapat dibeli dengan dana BPNT senilai Rp110.000,-. Studi eksperimental ini menunjukkan adanya pergeseran konsumsi. Merespons kenaikan harga, para konsumen sekarang menggunakan dana BPNT untuk membeli rata-rata 1,46 kg beras lebih banyak dan 3 butir telur lebih sedikit daripada sebelum kenaikan harga. Tambahan pembelian beras dari pendapatan pribadi mereka berkurang hanya sedikit setelah kenaikan harga (0,6 kg), namun pembelian telur berkurang hingga 4,44 butir telur. Menggunakan dana subsidi BPNT dan ditambah pendapatan pribadi, kenaikan harga menyebabkan konsumsi total beras bulanan melonjak dari 21,39 kg menjadi 22,25 kg, dan secara keseluruhan konsumsi telur jatuh dari angka 33,78 menjadi 26,41 butir telur.

Seperti dalam simulasi sebelumnya, dalam menghadapi kenaikan harga pangan, sebuah rumah tangga biasanya lebih memprioritaskan beras daripada telur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga beras dan telur mengurangi kemampuan BPNT untuk meningkatkan konsumsi beras dan telur untuk memfasilitasi konsumsi nutrisi yang lebih beragam pada keluarga prasejahtera.

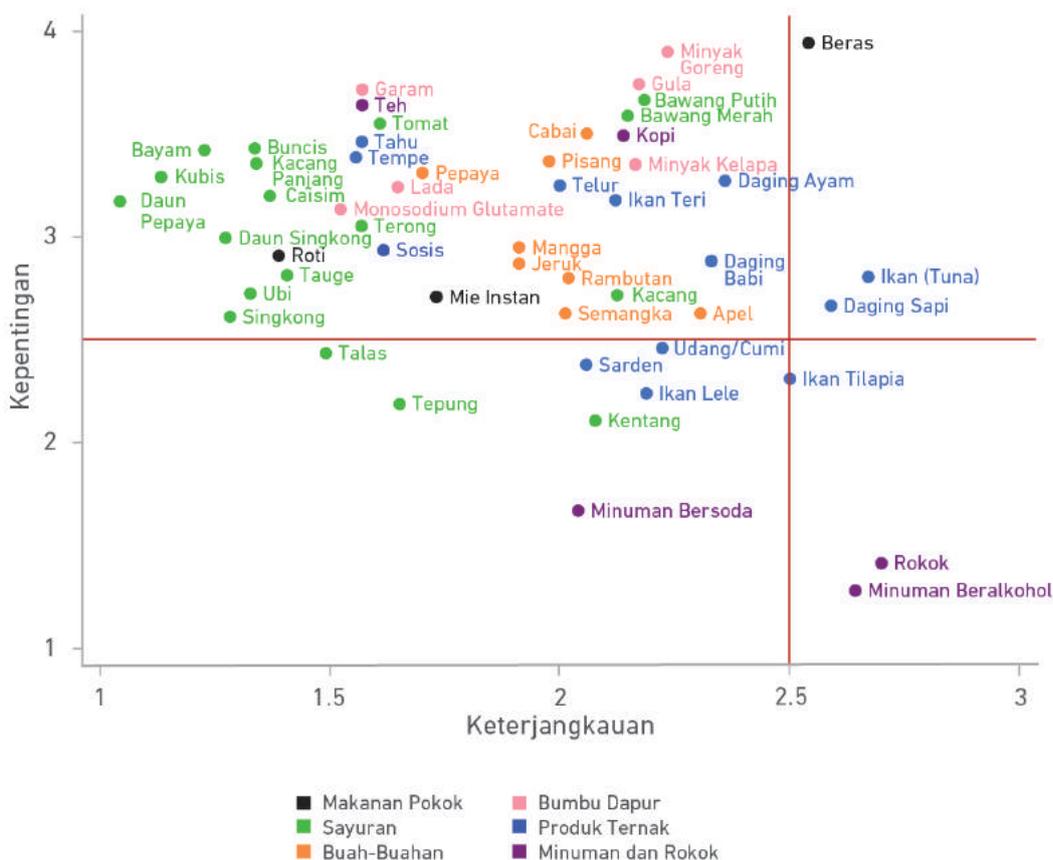
Menggunakan dana subsidi BPNT dan ditambah pendapatan pribadi, kenaikan harga menyebabkan konsumsi total beras bulanan melonjak dari 21,39 kg menjadi 22,25 kg, dan secara keseluruhan konsumsi telur jatuh dari angka 33,78 menjadi 26,41 butir.”

PENTINGNYA PANGAN SERTA KETERJANGKAUANNYA

Sementara dana BPNT mensubstitusikan sebagian pengeluaran rumah tangga yang berasal dari pendapatan pribadi dan meningkatkan konsumsi pangan, harga pangan yang lebih tinggi mengurangi peningkatan konsumsi dan memengaruhi keseluruhan komposisi pengeluaran rumah tangga. Khususnya, kenaikan harga pangan berprotein tinggi dapat menurunkan tingkat dan keragaman konsumsi nutrisi rumah tangga.

Alokasi rumah tangga dalam mengonsumsi beras, telur, dan komoditas lainnya di Sumba perlu dipertimbangkan. Responden survei menilai pentingnya setiap komoditas pangan dan persepsi mereka terhadap keterjangkauannya. Hal tersebut bisa merujuk ke komoditas lain yang membutuhkan perubahan kebijakan.¹⁷

Gambar 4.
Pemetaan Nilai Preferensi Komoditas Pangan



Sumber: Kalkulasi penulis

¹⁷Penjelasan lebih lanjut tersedia di bagian lampiran.

Gambar 4 mengategorikan komoditas pangan menjadi empat kelompok: kelompok paling penting dan paling mahal terlihat di kuadran kanan-atas—di sini kebijakan diperlukan untuk menurunkan harga. Kategori ini terdiri dari beras, ikan (tuna/tongkol), dan daging sapi. Komoditas tersebut kaya akan nutrisi dan dapat mengurangi malnutrisi di daerah yang diamati.

Komoditas yang dipandang penting dan terjangkau (kuadran kiri-atas) adalah yang tidak terlalu membutuhkan intervensi pemerintah. Kebanyakan jenis pangan ada pada kategori ini. Komoditas pangan yang dipandang tidak terlalu penting dan terjangkau (kuadran kiri-bawah) dapat didorong konsumsinya dengan meningkatkan edukasi konsumen, apabila memang komoditas tersebut bernutrisi dan tidak ada di menu mereka biasanya (contoh: Hidangan Laut). Minuman beralkohol dan rokok diklasifikasikan sebagai tidak penting dan tidak terjangkau (kuadran kanan-bawah).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Masyarakat Indonesia menghadapi tingginya harga pangan dan mengeluarkan sekitar setengah dari pendapatan mereka untuk pangan, bahkan lebih jika mereka berada di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan pengeluaran tersebut digunakan untuk membeli beras, sehingga menyebabkan kekurangan ragam nutrisi. Intervensi kebijakan oleh pemerintah Indonesia untuk menurunkan harga belum berhasil.

Program BPNT bertujuan untuk meningkatkan konsumsi nutrisi dengan dana bantuan sebesar Rp110.000,- untuk keluarga prasejahtera agar dapat membeli beras dan telur di e-warung yaitu penjual resmi yang memfasilitasi transaksi ini. E-warung menjual dengan harga pasar, sehingga efektivitas program ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat harga konsumen di Indonesia.

Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan beberapa langkah berikut ini:

1. Mengelola Program BPNT

BPNT sebagai program bantuan non-tunai di Indonesia dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan telah berhasil meningkatkan konsumsi beras dan telur keluarga prasejahtera, serta menutup sebanyak 15,16% pengeluaran rumah tangga. BPNT telah memperbaiki masalah terkait dana bantuan sebelumnya yang diberikan ke seluruh keluarga yang ada di daerah terkait alih-alih hanya pada keluarga yang prasejahtera. Selain itu, program ini telah meningkatkan kualitas bantuannya dengan mengizinkan penerima untuk memilih beras dan telur yang mereka inginkan. Di tahun 2020, Kementerian Sosial memperbarui dana BPNT dari Rp110.000,- menjadi Rp150.000,- per bulan dan pelanggan tidak hanya bisa membeli beras dan telur, tetapi juga kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Agar dapat terus meningkatkan efektivitas program ini, pemerintah sebaiknya terus memperbaiki sistem sasarannya sehingga dapat benar-benar membantu masyarakat yang paling membutuhkan skema ini.

“Agar dapat terus meningkatkan efektivitas program ini, pemerintah sebaiknya terus memperbaiki sistem sasarannya untuk sehingga benar-benar membantu masyarakat yang paling membutuhkan skema ini.”

2. Reformasi kebijakan pangan

Harga pangan yang tinggi mempengaruhi kinerja BPNT, keputusan belanja rumah tangga prasejahtera, serta kecenderungan untuk menderita malnutrisi yang lebih tinggi. Data survei menunjukkan bahwa di Pulau Sumba, wilayah yang ketahanan pangannya sangat rendah, kenaikan harga beras dan pangan berprotein tinggi dapat menyebabkan penurunan konsumsi pangan kaya protein, penurunan ragam nutrisi, dan peningkatan konsumsi beras dan mie instan lebih banyak. Perubahan perilaku konsumsi tersebut menyebabkan penurunan efektivitas program BPNT dengan adanya kenaikan harga beras dan telur. Sebuah studi oleh Homes dan Bhuvanendra sudah menemukan bahwa pada tahun 2013, harga pangan yang tinggi mengurangi nilai transfer uang tunai di daerah lain di Indonesia.

Upaya pemerintah untuk menurunkan harga pangan belum berhasil. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 dan Permendag Nomor 57 Tahun 2017 mengintervensi harga beras dan Permendag

Pemerintah harus mengubah fokus kebijakannya, dari mencoba untuk secara langsung mengintervensi harga, menjadi kebijakan yang mempermudah akses pasar untuk barang yang lebih murah.

Nomor 96 Tahun 2018 meregulasi harga telur. Pemerintah mengatur HET di level petani dan juga untuk konsumen agar tetap terjangkau. Akan tetapi, harganya telah naik melebihi harga eceran tertinggi dan lebih tinggi daripada harga di pasar dunia. Maka dari itu, pemerintah harus mengubah fokus kebijakannya, dari mencoba untuk secara langsung mengintervensi harga, menjadi kebijakan yang mempermudah akses pasar untuk barang yang lebih murah.

Untuk dapat menurunkan harga beras, pemerintah seharusnya mengurangi hambatan impor yang tengah berlaku. Hal tersebut akan menjadi solusi jangka pendek yang dapat menurunkan harga dan akhirnya dapat memperbaiki konsumsi nutrisi (Kuncoro et al., 2019). Khususnya, pemerintah perlu untuk menelaah hak monopoli impor BULOG, seperti yang diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, dan kuota impor yang diatur melalui rapat koordinasi antar-kementerian, seperti yang tercantum dalam Permendag Nomor 1 Tahun 2018 (Respatiadi dan Nabila, 2017).

Untuk menurunkan harga telur, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kebijakan yang memengaruhi industri jagung. Jagung adalah komposisi utama dalam pakan ternak ayam dan harga jagung memakan 50-60% biaya produksi hewan ternak, yang pada akhirnya akan memengaruhi harga telur. Harga jagung yang terjangkau tidak hanya akan menurunkan harga telur, tetapi juga membantu konsumen di daerah seperti Sumba dan daerah lainnya di bagian Timur Indonesia, di mana jagung adalah makanan utama. Agar dapat menurunkan harga, prosedur birokrasi perlu dikurangi agar dapat mempermudah proses impor jagung. Reformasi lebih lanjut juga perlu untuk mengurus masalah hambatan impor yang diatur dalam Permentan Nomor 57 Tahun 2015 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2018 (Ferlito dan Respatiadi, 2018; Freddy et al., 2018).

LAMPIRAN

A1. METODOLOGI

Agar dapat memahami bagaimana harga berdampak terhadap keputusan untuk membeli dan bagaimana BPNT telah berpengaruh terhadap konsumsi pangan, pertama-tama kami menghitung proporsi kebutuhan pangan bulanan rumah tangga yang dibiayai oleh dana BPNT melalui survei pengumpulan data dari latar belakang sosio-ekonomi subjek dan data konsumsi pangan (antara lain pengeluaran dan jumlah konsumsi) beras dan telur. Dengan mengacu pada pengeluaran bulanan rata-rata rumah tangga nasional dari MSC (2019), kami menghitung berapa besar pengeluaran pangan yang ditanggung BPNT. Kami juga menghitung konsumsi beras dan telur rata-rata rumah tangga dari sampel kami dan kuantitas telur dan beras yang dapat ditanggung oleh BPNT. Dalam hal kuantitas, kami berasumsi harga pangan setara dengan harga yang diamati ketika studi lapangan (Pulau Sumba).

Survei eksperimental digunakan untuk menghitung perbedaan konsumsi pangan sebagai hasil dari perubahan harga. Studi ini akan mengacu pada tinjauan rancangan riset eksperimental oleh Epstein et al. (2012) dan mengaplikasikan eksperimen laboratorium dalam subjek rancangan studi. Melalui metodologi ini, subjek dapat berpartisipasi dalam beberapa sesi, di mana setiap sesi mewakili kondisi yang berbeda-beda. Ini adalah rancangan yang digunakan dalam eksperimen, di mana perubahan harga dimanipulasi pada setiap sesi. Pertama-tama, subjek menyebutkan pengeluaran bulanan/mingguan/harian mereka untuk pangan, setelahnya subjek diminta untuk mengisi kuesioner yang mensimulasikan belanja beberapa komoditas pangan beserta harganya. Sekelompok komoditas pangan yang ditawarkan merefleksikan kelompok pangan dari survei sosio-ekonomi nasional (SUSENAS), tetapi disederhanakan menjadi hanya 12 komoditas, yaitu beras, daging ayam, daging sapi, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai, gula, mie, rokok¹⁸, minyak goreng, dan telur. Harga yang digunakan dalam kuesioner ini berdasarkan harga pasar yang diamati sebelum dimulainya survei. Beberapa komoditas dalam (SUSENAS) tidak selalu tersedia di beberapa daerah (misalnya, ikan lele), sehingga tidak kami ikut sertakan. Percobaan perubahan harga dalam simulasi bervariasi dari mulai paling rendah hingga harga paling tinggi, kemudian harga-harga tersebut digunakan untuk memperkirakan tren harga tahunan untuk setiap komoditas. Skenario yang diaplikasikan dalam rancangan studi eksperimen ini dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut. Rancangan penelitian ini pada dasarnya ingin mengobservasi perubahan konsumsi yang dilakukan oleh responden saat harga pangan meningkat. Desain penelitian ini juga mengakomodasi kondisi di mana terdapat program BPNT dan tidak terdapat program BPNT dalam rangka untuk mengukur signifikansi yang dikontribusikan program ini bagi para responden untuk mengatur penyesuaian pola konsumsi di saat terjadi perubahan harga pangan.

¹⁸ Rokok dianggap sebagai komoditas pangan menurut BPS. Kelompok pangan terdiri dari komoditas yang tercatat banyak dibeli oleh masyarakat, serta mengindikasikan pentingnya komoditas tersebut bagi masyarakat.

Skenario	Komoditas (Perubahan Harga - dalam Rupiah)
1 (Harga awal)	Harga Sesungguhnya
2	Beras (+500), Telur (+500)
3	Daging ayam (+22000), Daging sapi (+3000), Telur (+500) Harga lainnya kembali ke harga sesungguhnya
4	Harga Sesungguhnya Simulasi BPNT Diaplikasikan
5	Beras (+500), Telur (+500) Simulasi BPNT Diaplikasikan

Kuesioner nilai preferensi digunakan untuk lebih menguatkan studi ini. Responden dihadapkan dengan kuesioner yang penuh dengan daftar komoditas pangan SUSENAS dan diinstruksikan untuk menentukan preferensi nilai untuk semua komoditas. Ada dua aspek yang dipertimbangkan: apakah sebuah komoditas dianggap penting (1: sangat tidak penting, 2: tidak penting, 3: penting, 4: sangat penting) dan apakah sebuah komoditas harganya terjangkau (1: sangat mahal, 2: mahal, 3: murah, 4: sangat murah, 0: tidak pernah membeli/tidak tahu produknya). Nilai dari semua responden kemudian dirata-ratakan.

Pendekatan yang kami lakukan dalam memilih sampel penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling, di mana studi ini hanya mewawancarai kaum ibu¹⁹, mengingat mereka dianggap sebagai penerima BPNT dan menentukan hampir semua keputusan pengeluaran rumah tangga di Indonesia (*The Asian Parents* seperti yang dikutip oleh Baqiroh dan Trihendrawan, 2018). Studi ini melibatkan setidaknya 58 ibu-ibu dari dua daerah penelitian. Setiap ibu mengikuti sesi eksperimental yang berlangsung kurang lebih satu jam, termasuk 15-20 menit pengarahan dan simulasi pada awal sesi. Responden tidak diizinkan untuk memakan makanan apapun dan hanya boleh minum air selama dua jam sebelum eksperimen untuk menghindari pengaruh terhadap pilihan pangan dalam survei (Beneke & Davis, 1985). Hal tersebut dikonfirmasi dengan menanyakan pada setiap responden, waktu terakhir mereka makan. Untuk memastikan mereka mematuhi ketentuan tersebut, eksperimen dilakukan menjelang siang atau menjelang malam (jam 10-12 pagi atau jam 4-6 sore).

Agar dapat menentukan pengaruh harga pangan, wawancara dilakukan dengan beberapa pemilik e-warung dan pemasok beras dan telur e-warung, serta departemen-departemen di bawah otoritas pemerintah daerah guna memperkaya pemahaman akan BPNT dan tantangan-tantangan yang muncul dalam menjalankan program tersebut.

¹⁹ Dalam studi ini, istilah ibu didefinisikan sebagai wanita yang telah menikah dan masih menikah. Seorang ibu diharapkan tinggal dalam suatu rumah tangga dan memiliki suami yang masih hidup dan/atau anak sebagai tanggungan dari belanja bulanan. Para ibu yang dipilih dalam sampel ini datang dari lima desa berbeda yang tersebar di dua kabupaten. Kami meminta bantuan Kepala Desa setempat untuk memilih 10-15 ibu yang sesuai dengan kriteria tersebut secara acak untuk dijadikan sampel.

A2. E-WARUNG DI KUPANG

E-warung diciptakan sebagai bagian dari program usulan Kementerian Sosial yang bertujuan menguatkan penerima program PKH untuk membuat kerja sama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) guna meningkatkan keterampilan bisnis dan membantu mereka untuk perlahan melepaskan diri dari bantuan sosial. Untuk melaksanakan studi lapangan di Kupang dari tanggal 15-27 Januari 2019, delapan e-warung KUBE dipilih secara acak sebagai subjek untuk wawancara. Dari semua yang diwawancarai, kemiripan dan perbedaan pola muncul serta dapat membantu menjelaskan efektivitas program BPNT.

Lima dari delapan e-warung KUBE tidak menyebutkan pendirinya, sementara tiga lainnya, termasuk e-warung KUBE Edelweis dan e-warung KUBE Tulidei, menyatakan bahwa pemrakarsa e-warung mereka adalah pendamping PKH. E-warung KUBE Teratai awalnya didirikan berdasarkan keputusan pemimpin daerah setempat. Semua e-warung KUBE terdiri dari 10 anggota, kecuali e-warung KUBE Teratai (7 anggota), dan e-warung KUBE Beringin (8 anggota). Kementerian Sosial menyediakan modal investasi awal untuk setiap e-warung KUBE untuk membeli komoditas pangan. Hanya dua kios yang menyebutkan berapa uang yang diberikan oleh pemerintah: E-warung KUBE Bonsai menerima Rp30.000.000,-, sementara E-warung KUBE Beringin mengklaim menerima Rp5.000.000,-. Akan tetapi, e-warung KUBE Bonsai, e-warung KUBE Sehati, dan e-warung KUBE Abadi tidak menyebutkan adanya peran pemerintah saat pendiriannya. Empat e-warung menyatakan bahwa Bank HIMBARA, yaitu Bank NTT dan Bank BRI memberikan pelatihan untuk mengoperasikan mesin *electronic data capture* (EDC) di kios-kios mereka. Selain itu, empat e-warung menyebutkan bahwa anggota mereka berkontribusi dalam bentuk lahan. Tiga dari mereka mengungkapkan ada beberapa hambatan operasional: e-warung KUBE Sehati mengeluhkan bahwa mereka tidak menghasilkan keuntungan yang banyak, sehingga para anggotanya enggan membantu para pengurus. E-warung KUBE Abadi tidak pernah sepenuhnya menjual komoditas mereka karena kurangnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) di wilayah mereka. E-warung KUBE Kelapa hanya beroperasi dengan dua anggota, karena yang lainnya tidak tertarik.

Selain dari hambatan-hambatan tersebut, hampir semua e-warung mengalami masalah dengan rantai pasokan mereka. Dua dari mereka mengonfirmasi bahwa dinamika harga yang tinggi menciptakan masalah dengan modifikasi kelompok komoditas (e-warung KUBE Edelweis) dan menyebabkan kerugian (e-warung KUBE Teratai). Beberapa dari mereka menyampaikan sedikit kekhawatiran tentang lambatnya distribusi pangan dan pengiriman uang kepada penerima. Satu e-warung menolak untuk membayar biaya pembiayaan komoditas di muka dengan menggunakan uang mereka sendiri.

A3. DAERAH STUDI: SUMBA

Sumba Barat

Sumba Barat memiliki luas area yang besar, yaitu 737 km². Di tahun 2016, terdapat 63 desa dan 11 kelurahan di Sumba Barat. Sumba Barat tercatat memiliki penduduk sebanyak 125.776 orang pada tahun 2017. Populasinya sangat muda, dengan penduduk berusia 0-9 tahun sebesar 25,66% dari total populasi. Sektor pertanian mendominasi bursa kerja di Sumba Barat (62,55%), diikuti dengan sektor jasa (33,08%), dan sektor manufaktur (4,37%) pada tahun 2015.

Angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat relatif tinggi - pada tahun 2016 tingkat kemiskinan mencapai 29,34%, atau sekitar 36.210 orang. Semakin kecil pendapatan, semakin besar proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi pangan. Populasi Kabupaten Sumba Barat memiliki pengeluaran rata-rata sebesar Rp623.154,- per bulan, dengan pengeluaran untuk pangan mencapai Rp363.163,- (sekitar 58% dari total pengeluaran) dan Rp259.971,- untuk pengeluaran non-pangan. Proporsi pengeluaran terbesar digunakan untuk membeli beras. Di tahun 2018, 40,61% populasi menerima beras subsidi di bawah program Rastra, sementara program pemerintah lainnya mencapai 33,64% (Kartu Keluarga Sejahtera - KKS) dan 54,79% (Program Keluarga Harapan - PKH).

Sumba Barat Daya

Sumba Barat Daya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersebelahan dengan Kabupaten Sumba Barat. Luas total wilayahnya adalah 1.445,32 km². Terdapat 175 desa dan 11 kelurahan pada 2017 dan populasinya diproyeksi akan mencapai 331.894 orang di tahun yang sama. Populasi muda mendominasi komposisi populasi di Sumba Barat Daya hingga 52,76%.

Tingkat kemiskinan di Sumba Barat Daya relatif tinggi. Dari tahun 2013 dan seterusnya, jumlah warga prasejahtera di area ini meningkat dan mencapai angka 30,13% pada tahun 2017. Statistik Sumba Barat Daya melaporkan 51,58% rumah tangga di daerah itu menerima subsidi beras Rastra dan 35,54% rumah tangga dibantu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2018. Sumba Barat Daya menduduki peringkat ke-5 dari kasus malnutrisi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sumba Barat Daya sangat bergantung pada sektor pertanian, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB daerah. Pekerjaan yang tersedia untuk populasi usia kerja di Sumba Barat Daya adalah pada sektor pertanian dan pertambangan/penggalan (71,30%), sektor jasa (15,66%), dan sektor manufaktur (13,04%). Sektor utama yang berkontribusi terhadap PDB daerah adalah, pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai angka 40,11% pada tahun 2017.

Di tahun 2017, total pengeluaran per kapita Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Rp447.778,- per bulan dan 70,27% digunakan untuk konsumsi pangan. Bahkan di antara orang-orang dengan pengeluaran bulanan kuintil tertinggi, 56,44% pendapatan digunakan untuk pangan. Populasi Sumba Barat Daya sangat bergantung pada konsumsi beras, yang merupakan proporsi terbesar dari pengeluaran pangan. Peningkatan harga beras akan sangat berdampak pada mereka.

REFERENSI

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI. (2016). PANEL HARGA PANGAN BKP PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN. Diambil dari <http://panelhargabkp.pertanian.go.id/2016/>

Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI. (2017). Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan. Diambil dari [http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Evalap/Laporan Tahunan BKP Tahun 2016_.pdf](http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Evalap/Laporan%20Tahunan%20BKP%20Tahun%202016_.pdf)

Bank Indonesia. (n.d.). Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Diambil dari <http://hargapangan.id/>

Baqiroh, N. F. A. B. (2018, September 12). 99% Ibu di Indonesia Menjadi Penentu Belanja Rumah Tangga: Lifestyle. Diambil dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20180912/220/837534/99-ibu-di-indonesia-menjadi-penentu-belanja-rumah-tangga>

Beneke, W. M., & Davis, C. H. (1985). Relationship of hunger, use of a shopping list and obesity to food purchases. *International Journal of Obesity*, 9(6), 391–396. Diambil dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3830932>

BPS (2018). Rata-Rata Konsumsi per Kapita Seminggu Beberapa Macam Bahan Makanan Penting, 2007-2018. Diambil dari <https://www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan-pengeluaran.html#subjekViewTab3>

BPS Kabupaten Sumba Barat. (2017). *Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat*. Waikabubak.

BPS Kabupaten Sumba Barat. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat*. Waikabubak.

BPS Kabupaten Sumba Barat Daya. (2018). *Statistik Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya*. Tambolaka.

BPS Kabupaten Sumba Barat Daya. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat Daya*. Tambolaka.

Epstein, L. H., Jankowiak, N., Nederkoorn, C., Raynor, H. A., French, S. A., & Finkelstein, E. (2012). Experimental research on the relation between food price changes and food-purchasing patterns: a targeted review. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 95(4), 789–809. doi: 10.3945/ajcn.111.024380

Freddy, I. M., Respatiadi, H., & Gupta, G. E. K. (2018, November). Mereformasi Kebijakan Perdagangan untuk Menurunkan Harga Jagung di Indonesia. Diambil dari https://docs.wixstatic.com/ugd/c7d5c3_930d8379dc824ca2aa764dbcea4df511.pdf

Gewati, M. (2018, Desember 12). Kemensos Targetkan BPNT Tersalurkan ke 151 Kabupaten pada 2019. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/13/06370631/kemensos-targetkan-bpnt-tersalurkan-ke-151-kabupaten-pada-2019>

Holmes, R., Bhuvanendra, D. (2013). *Social protection and resilient food systems: The role of cash transfers*. Overseas Development Institute. Diambil dari <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8601.pdf>

Iswara, M. A. (2019, 3 Juni). Bulog to be main rice supplier for poor. Diambil dari <https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/03/Bulog-be-main-rice-supplier-poor.html>

JPNN. (2019, 27 Februari). Permendag No 96: Dilarang Jual Telur Secara Butiran, Harus Ditimbang. Diambil dari <https://www.jpnn.com/news/permendag-no-96-dilarang-jual-telur-secara-butiran-harus-ditimbang>

Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Profil Kesehatan Nusa Tenggara Timur*.

Kementerian Kesehatan RI. (2 November 2018). Potret Sehat Indonesia dari Riskesdas 2018. Diambil dari <http://www.depkes.go.id/article/view/18110200003/potret-sehat-indonesia-dari-riskesdas-2018.html>

Kementerian Pertanian RI. (2017). Outlook Tphorti. Diambil dari <http://epublikasi.pertanian.go.id/arsip-outlook/537-outlook-tphorti-2017>

Kuncoro, A., Mansury, Y., Patunru, A. A., Resosudarmo, B. P. (2019). Do Trade Reforms Promote Nutritional Status? Evidence from Indonesia, in: Amitrajeet A. Batabyal, Yoshiro Higano, Peter Nijkamp (eds.), Disease, Human Health, and Regional Growth and Development in Asia,

Mayasari, Dewi & Noor, Iswan & Satria, Dias. (2018). Analisis Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Miskin di Provinsi Jawa Timur. 10.20961/jjep.v18i1.16658.

Microsave Consulting (MSC). (Januari 2019). BPNT Operation Assesment. Diambil dari https://www.microsave.net/wp-content/uploads/2019/02/190201_BPNT-REPORT_Final_.pdf

Park, J., Lee, J.-S., Jang, Y. A., Chung, H. R., & Kim, J. (2011). A comparison of food and nutrient intake between instant noodle consumers and non-instant noodle consumers in Korean adults. *Nutrition Research and Practice*, 5(5), 443. doi: 10.4162/nrp.2011.5.5.443

Pro Balikpapan. (11 April 2019). Telur Tak Boleh Dijual Per Butir. Diambil dari <https://balikpapan.prokal.co/read/news/244231-telur-tak-boleh-dijual-per-butir.html>

Respatiadi, H., & Nabila, H. (2017, November). Removing Restrictions on Rice Trade in Indonesia. Diambil dari https://docs.wixstatic.com/ugd/c7d5c3_2a485fd41a224b78b60d430325ce6e30.pdf

Rilis.id. (2017, 20 Juni). Ini Faktor Mahalnya Harga Pangan di Indonesia. Diambil dari <http://rilis.id/ini-faktor-mahalnya-harga-pangan-di-indonesia.html>

TNP2K. (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Diambil dari [http://tnp2k.go.id/download/67280171116_Pedoman Umum BPNT 2018_Final_HighRes.pdf](http://tnp2k.go.id/download/67280171116_Pedoman%20Umum%20BPNT%202018_Final_HighRes.pdf)

TNP2K. (2018). *Materi Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) 2018*. Diambil dari [http://www.tnp2k.go.id/download/38087Materi Sosialisasi BPNT 2018.pdf](http://www.tnp2k.go.id/download/38087Materi%20Sosialisasi%20BPNT%202018.pdf)

Trihendrawan, N. (2018, 13 September). Enam Temuan Penting Survei 'Emak-Emak' Digital Masa Kini di Indonesia. Diambil dari <https://autotekno.sindonews.com/read/1338011/133/enam-temuan-penting-survei-emak-emak-digital-masa-kini-di-indonesia-1536839410>

Bank Dunia. (2019, 4 Februari). World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet). Diambil dari <http://pubdocs.worldbank.org/en/550191549309123169/CMO-Pink-Sheet-February-2019.pdf>

World Food Programme. (2015). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia. Diambil dari http://en.fsva.wfp.or.id/public/attachments/fsva_full_id.pdf

World Health Organization. (2018, 16 Februari). Malnutrition. Diambil pada 9 Agustus 2018, dari <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>

TENTANG PENULIS

Assyifa Szami Ilman adalah Research Analyst di Bank Dunia, Jakarta dan Asisten Peneliti di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Sebelumnya, ia merupakan peneliti muda di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) dimana penelitiannya berfokus pada kebijakan perdagangan pangan dan malnutrisi. Semasa di CIPS, ia bertanggung jawab atas Bu RT Index, indeks yang membandingkan harga pangan di Indonesia dan di negara-negara lain. Ilman merupakan alumni jurusan Ekonomi dari Universitas Indonesia.

Kidung Asmara Sigit merupakan Peneliti Muda di CIPS dengan fokus area penelitian di bidang Kesejahteraan Masyarakat. Kidung adalah lulusan dari Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Nadia Fairuza Azzahra adalah Peneliti Muda di Center for Indonesian Policy Studies. Pada saat ini, ia sedang melakukan riset di bidang pendidikan. Sebelum bergabung dengan CIPS, Nadia melakukan magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina. Ia juga memiliki pengalaman bekerja di sebuah perusahaan rintisan berbasis pendidikan di Indonesia.

AYO BERGABUNG DALAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Annual Gala Dinner CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (sesuai permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.



Pindai untuk bergabung

TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:

Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.

Kesempatan Ekonomi: CIPS mengadvokasi kebijakan yang bertujuan untuk memperluas kesempatan ekonomi dan peluang bagi pengusaha dan sektor bisnis di Indonesia, serta kebijakan yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan menciptakan kesejahteraan ekonomi

Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.

Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikut dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia